

Majalah Tri Wulan
Prodi Ekonomi Syariah
STAIN Kudus

Muamalat

Inspirasi
Ekonomi
Syariah

Vol. 2 No. 3
Jul - Sep
2014



Belajar
Islamic Finance

University
Governance: A Part of
Good Governance

Ideologi Sistem
Ekonomi Islam

Islamic Work
Ethics:
An Introduction

Daftar Isi

- **MURABAHAH DALAM PRAKTIK**
Irsad Andriyanto, M.Si.
- **STRATEGI INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL SYARIAH**
Muhammad Husni M.
- **MUSTAGHLAT: SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM**
Murtadho Ridwan
- **ASURANSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
Shobirin, S.Ag, M.Ag
- **LEMBAGA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA**
Junaidi Abdullah
- **PEMBERDAYAAN UMAT MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**
Suhadi
- **PERAN UMAT ISLAM INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**
Jaenal Arifin
- **BELAJAR ISLAMIC FINANCE**
Kisdiyanto
- **IDEOLOGI SISTEM EKONOMI ISLAM**
Agus Retnanto
- **FIKIH DAN REKAYASA GENETIKA: MENYDAL KLONING DAN TRANSPLANTASI TUBUH**
Lina Kushidayati
- **UNIVERSITY GOVERNANCE: A PART OF GOOD GOVERNANCE**
Bayu Tri Cahya
- **MEMIMBANG KEMBALI EMAS SEBAGAI ALAT TRANSAKSI EKONOMI**
Ummu Farida
- **ISLAMIC WORK ETHICS: AN INTRODUCTION**
Wahbur Rokhmah
- **SISTEM LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH: UPAYA PENGUATAN MICRO FINANCE SYARIAH**
Anita Rahmawaty
- **MENELUSURI KONSEP KAYA DALAM ISLAM**
Monja, M.Ag.
- **PESAING ADALAH TRUTH LOVER BUKAN HEATER**
Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM.
- **BREAK EVEN POINT SEBAGAI DASAR PERENCANAAN LABA**
Tito Martin
- **SISTEM EKONOMI ISLAM BERBANDING DENGAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS KAPITALIS**
Karebet Gunawan
- **MOTIVASI DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**
Muhammad Mustaqim
- **RIBA PENYEBAB GANGGUAN MENTAL, RASA BERSALAH SOLUSINYA**
Farida

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH MUAMALAT

Vol. 2, No. 3, Juli-September 2014

Penanggung Jawab

Shobirin, M.Ag.

Redaktur

Suhadi, SE, MSA

H. M. Husni Mubarak, SE, MM

Penyunting

Karebet Gunawan, SE, MM

Amirus Sodik, Lc., M.A.

Desain Grafis & Fotografer

Rosita Afiany, SE

Lina Kushidayati, SHI, MA

Sekretariat

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum

Irsad Andriyanto, SE, M.Si.

Majalah Tri Wulan Bisnis Syar'i
diterbitkan oleh Prodi
Ekonomi Syari'ah
STAIN Kudus



SISTEM *LINKAGE* PROGRAM BANK

SYARI'AH: Upaya Penguatan *Micro Finance*

Syariah

Oleh: Anita Rahmawaty

Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014 menunjukkan bahwa pada September 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47%), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 28,07 juta orang (11,37%). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2013 mengalami peningkatan dibanding enam bulan sebelumnya.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) No. 38/05/Th. XVII, Mei 2014, jumlah pengangguran pada Februari 2014 mencapai 7,15 juta orang, mengalami sedikit penurunan, yaitu sebanyak 260.000 orang

jika dibanding Agustus 2013 dan berkurang sebanyak 50.000 orang dibanding Februari 2013. Dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, di mana TPT Februari 2014 sebesar 5,70% turun dari TPT Agustus 2013 sebesar 6,17% dan TPT Februari 2013 sebesar 5,82%. Pada Februari 2014, TPT untuk pendidikan SMA menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 9,10%, disusul dengan TPT SMP sebesar 7,44%. Sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,69%. Sementara jika dibandingkan keadaan Februari 2013, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan kecuali pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Meskipun pada semester ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami penurunan untuk pendidikan Diploma dan Sarjana, namun masih menyumbang angka pengangguran yang relatif tinggi.

Kondisi sebagaimana

dikemukakan di atas, sangat memprihatinkan, sebab dalam waktu yang bersamaan pemerintah terlalu membanggakan pertumbuhan ekonomi makro yang bisa mencapai 6,23 %. Realita ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro yang selama ini dibanggakan pemerintah, ternyata tidaklah menggambarkan realita perekonomian masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu peran perbankan syari'ah dan lembaga keuangan mikro syariah (*micro finance syariah*) perlu ditingkatkan, mengingat kedua lembaga ini telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Andika, 2013: 2).

Kajian ini mencermati bagaimana peran sistem *linkage* program bank syari'ah dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) atau *micro finance syari'ah*. Sejak 2005, bank syari'ah telah melakukan program aliansi dengan jaringan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah/*Micro Finance Syariah* sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Jaringan ini dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syari'ah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada sektor UMKM melalui *linkage* program. Namun demikian, hingga tahun 2012 proses sinergi antara bank syariah dengan

LKMS/*micro finance syari'ah*, masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan solusi untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Harapannya, kajian ini dapat mengoptimalkan proses sinergi antara bank syari'ah dengan LKMS/*micro finance syariah*, sehingga akhirnya kedua lembaga ini mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Sekilas tentang Sistem *Linkage* Program Bank Syari'ah

Sistem *Linkage program* bank syari'ah adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan yang dilaksanakan bank umum syari'ah kepada Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance*) sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Program ini bertujuan agar Lembaga Keuangan Mikro dapat memperluas akses pembiayaan kepada para anggotanya. Sebenarnya, *linkage* program Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sudah ada sejak tahun 2001. Namun, pada saat itu, *linkage* program belum terorganisasi dengan benar, baik secara konsep maupun mekanisme. *Linkage program* mulai terorganisasi ketika Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004 dan *linkage* menjadi salah satu program dalam pilar satu API. Salah satu momentum yang juga membangkitkan semangat ber-*linkage* antara Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat adalah keluarnya *Generic Model Linkage Program*. Sejak saat itulah, aturan-aturan main *linkage* menjadi semakin jelas, seperti adanya persyaratan minimum BPR peserta *linkage*, munculnya 3 (tiga) skim *linkage*, yang terdiri dari: *executing*, *channeling*, dan *joint financing* serta kode etik peserta *linkage* (Maesaroh, 2011: 10).

Dalam skema *executing*, Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Skema *channeling* menempatkan BMT sebagai intermediator Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dengan pelaku UMKM. Sementara itu, skema *joint financing* adalah pola di mana Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM (Andika, 2013: 10).

Proses *linkage program* ini sudah dilaksanakan oleh bank syariah kepada BMT. Setidaknya pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat ada 2 bank syariah yang melakukan *linkage program*, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Namun demikian, sinergi antara Bank syariah dan BMT harus diperkuat, karena saat ini sinergi antara keduanya belum maksimal. Hubungan antara keduanya harus *'take and give'*. Disatu sisi BMT

mampu menyalurkan dana dari bank syariah dan sisi lain persaingan pasar dapat dilakukan secara sehat. Hubungan antara bank syariah dan BMT saat ini dalam persoalan aturan adalah persaingan bukan sinergi. Karena pada realitanya, saat ini ada beberapa bank syariah yang membuat produk-produk dengan segmentasi yang mereka turunkan sampai pada level yang seharusnya menjadi hak BMT. Kondisi ini, jika tidak diselesaikan, pada akhirnya bisa mengganggu proses sinergi antara Bank Umum Syariah dengan BMT (Andika, 2013: 10).

Peran BSM pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga patut diapresiasi. Bank yang memiliki *market share* terbesar perbankan syariah tersebut, memiliki misi mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan segmen UMKM. Perhatian BSM pada UMKM bisa dilihat dari catatan penyaluran kredit selama 2010. Sebesar Rp13,8 triliun diserap sektor UMKM, dan hanya Rp 7,8 triliun yang dikucurkan pada korporasi (<http://www.radarcirebon.com>). Sedangkan untuk program kemitraan (*linkage program*) BSM per-September 2010 mencapai sekitar Rp 1 triliun. BSM telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1000 koperasi, 6 BPR dan 40 BPRS yang menjadi nasabah BSM. Dalam kerja sama dengan permodalan BMT, BSM telah

merealisasikan dana sekitar Rp 19 miliar dengan pola *executing*. Sektor yang dimasuki untuk *linkage program*-pun beragam, mulai dari perdagangan hingga pertanian (<http://www.republika.co.id>).

Sistem Linkage Bank syariah dengan LKMS (Micro Finance Syariah)/ BMT

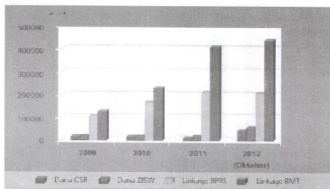
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) atau *micro finance syari'ah*, yang antara lain dipresentasikan oleh BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) dan koperasi pesantren (kopontren) sangat vital perannya dalam menjangkau transaksi syari'ah di daerah-daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syari'ah. Kiprah BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, toko kelontong, sembako, kios sepatu, dan lain-lain telah sukses bermitra dengan BMT dengan memperoleh pendanaan yang murah, mudah dan berkah (Tahir, 2004: 3).

BMT didefinisikan oleh Amin Aziz (dalam Tahir, 2004: 4) sebagai "Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul mal wat tamwil*. Dari segi *baitul mal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infaq dan shadaqoh untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Sedang pada aspek *baitut tamwil*,

BMT mengembangkan aspek-aspek produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya".

Dengan demikian, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau *micro finance syaria*h yang mampu bergerak pada level paling bawah dalam aktifitas masyarakat kecil serta memiliki fungsi sebagai lembaga pembiayaan yang mudah dengan penggunaan tata cara syariah (Andika, 2013: 8). Pada tahun 2012, BMT yang secara historis dicanangkan oleh Presiden Soeharto atas inisiatif ICMI sebagai salah satu lembaga keuangan mikro ini sudah berjumlah sebanyak sekitar 3.900 BMT dan tersebar di seluruh Indoensia. Dengan jumlah yang sebesar itu, maka dapat dikatakan bahwa BMT merupakan ujung tombak yang sangat efektif dalam menghadapi dan melayani pembiayaan masyarakat bawah dan UMKM di sektor riil (Harahap, 2008: 59).

Secara legal, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau *micro finance syaria*h yang berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. BMT mengeluarkan berbagai macam produk, seperti produk pembiayaan, jual beli barang (BBA, *murabahah, bai' as-salam*) , ijarah



Sumber: Bank Indonesia, 2013.

Gambar 1. Pertumbuhan Dana Sosial dan *Linkage* (Rp Juta)

(*leasing, bai' takjiri, musyarakah mutanaqishah*), serta pembiayaan untuk sosial (*qordhul hasan*).

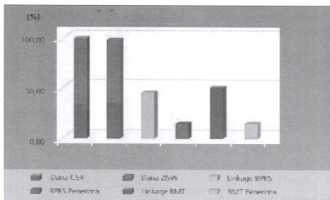
Sementara itu, perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dan menggembirakan, jika dilihat dari segi kuantitas dan pertumbuhan tahunan. Pada tahun 2011, pertumbuhan aset BMT sebesar 48,1% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi selama tiga tahun terakhir, dan pangsa pasar BMT telah mencapai $\pm 3,7$ %. Total aset yang dimiliki BMT juga cukup menggembirakan, per Oktober 2011 total aset yang dimiliki BMT telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah BMT semakin meningkat menjadi 3.900

unit (Andika, 2013: 8).

Berkaitan dengan pertumbuhan BMT penerima *linkage* program bank syaria'ah dilaporkan bahwa dari 8 Bank Syariah dan 4 Unit Usaha Syariah yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan *linkage*, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: (a) dana CSR Rp 42,2 milyar, (b) dana ZISW Rp 52,7 milyar, (c) *linkage* program BPRS Rp 207,2 milyar dan (d) *linkage* program BMT Rp 439,2 milyar (BI, 2013: 16).

Pertumbuhan dana sosial dan *linkage* program bank syariah dapat terlihat dari gambar 1.

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan dari bank syariah kepada BMT dari



Sumber: Bank Indonesia, 2013.

Gambar 2. Rata-Rata *Growth* Dana Sosial dan *Linkage*

tahun ke tahun selalu meningkat, bahkan pembiayaan bank syariah pada BMT meningkat sangat pesat pada tahun 2011. Pada tahun 2010 bank syariah memberikan *linkage* program sebesar 220 Milyar, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 439,2 Milyar. Peningkatan ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi perkembangan BMT, namun sayangnya peningkatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah ternyata tidak diikuti oleh pertumbuhan yang bagus bagi BMT penerima. Rata-rata pertumbuhan dana sosial dan *linkage* pada gambar 2.

Rendahnya pertumbuhan yang dialami oleh BMT penerima disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut Andika (2013: 12), faktor utama yang menyebabkan

rendahnya pertumbuhan BMT penerima ini jika dibandingkan dengan BPRS penerima adalah dikarenakan bank syariah tidak melakukan program peningkatan manajemen pada pengurus BMT, sebagaimana layaknya perbankan dalam ukuran yang lebih kecil. Kurangnya pelatihan manajemen organisasi ini, memang tidak mengherankan jika pertumbuhan BMT penerima menjadi jauh lebih rendah dari BPRS penerima yang notabene telah memiliki sistem manajemen yang lebih bagus. Jika kondisi ini dibiarkan, maka sinergi yang telah berjalan antara bank syariah dengan BMT tidak bisa menghasilkan output yang maksimal dikarenakan pertumbuhan BMT itu hanya kecil,

sehingga, kemampuannya dalam mengembangkan UMKM juga akan kecil.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan manajemen dan profesionalitas pengelola BMT, maka bank syariah bisa menerapkan beberapa tahapan yang bertujuan memberikan dan membentuk standarisasi sistem kerja BMT sebagaimana layaknya sistem kerja dan teknik operasional standar Bank syariah. Tahapan yang dilakukan untuk proses standarisasi sistem kerja ini, menurut Andika (2013: 12-13) dapat berupa: (a) melakukan pembekalan teoritis tentang sistem perbankan; (b) melaksanakan program magang bagi pengelola BMT di bank syariah; dan (c) melakukan pembinaan dan pelatihan.

Pertama, pembekalan teoritis tentang mekanisme manajemen organisasi bagi pengelola BMT dapat dilakukan berupa pemberian materi di kelas sebagaimana proses pembelajaran di sekolah atau melalui pemberian materi yang bisa dipelajari oleh peserta di rumah. Namun untuk membuktikan bahwa mereka telah menguasai teori, maka bank syariah harus melakukan tes tertulis melalui proses diskusi (FGD) dengan memberikan mereka suatu kasus dan meminta mereka untuk memecahkannya berdasarkan teori yang telah mereka pelajari.

Kedua, pemberian proses magang bisa dilakukan 3 kali dalam satu

tahun, setidaknya untuk setiap BMT yang menjadi mitra *linkage* bank syariah tersebut. Dengan pengenalan ini diharapkan setelah proses magang selesai, atmosfer kerja bank syariah yang lebih tersistematis tersebut bisa dibawa ke lingkungan BMT mereka masing-masing.

Ketiga, para pengelola BMT juga harus dibekali cara manajemen operasional BMT dengan pendekatan bank syariah. Hal ini berguna agar sistem operasional BMT lebih sistematis dan tertata sebagaimana sistem operasional perbankan yang lebih profesional. Pelatihan operasional ini bisa dilakukan ketika proses magang di bank syariah, atau bisa juga dilakukan di BMT masing-masing dengan cara mengirimkan karyawan bank syariah untuk memberikan pembelajaran masukan tentang sistem operasional yang bisa diterapkan di BMT tersebut.

Akhir kata, sistem *linkage program* bank syari'ah ini merupakan strategi penyaluran pembiayaan sebagai perpanjangan pihak bank umum syari'ah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada sektor UMKM. Proses sinergi antara bank syariah dengan LKMS/*micro finance syari'ah*/BMT ini perlu ditingkatkan melalui penyediaan program magang dan pelatihan, baik secara teoritis maupun praktis tentang sistem manajemen BMT agar sistem operasional dan lingkungan kerja BMT mendekati sistem perbankan

syariah yang lebih sistematis dan profesional. Harapannya, sistem *linkage program* bank syariah ini dapat berjalan optimal sehingga dapat menjadi penguatan pengembangan LKMS/*micro finance syariah*/BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, Anggi "Optimalisasi Sistem Linkage Pada BMT Dalam Pengembangan UMKM dan Pemberantasan Kemiskinan", diakses dari <http://share.pdfonline.com/ce89f2a400b2479d96b029e0630ac423/Optimalisasi%20Sistem%20Linkage%20Pada%20Pengembangan%20UMKM.htm>, 25 Oktober 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS) No. 38/05/Th. XVII, Mei 2014.

Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013", 2013.

Harahap, Sofyan S., "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Sektor Riil", dalam *Jurnal Muamalah, Shariah Economic Forum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 5, Februari 2008, hlm. 47-64.

Maesaroh, Siti, "Efektivitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Radar Cirebon, "BSM kucuri

UMKM Rp 13,8T", diakses dari <http://www.radarcirebon.com/bsm-kucuri-umkm-rp138-t>, 22 Oktober 2013.

Republika, "Linkage Program BSM Tembus Rp 1 T", diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/10/06/138337-linkage-program-bsm-tembus-rp-1-t>, 22 Oktober 2013.

Tahir, Toto, "Eksistensi BMT (Baitul Mal wat Tamwil) sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", dalam *Kapita Selekta Hukum Masalah Bisnis dalam Kajian Hukum*, Bandung: Penerbit Fakultas Hukum Unisba, 2004.